

ABSTRAK

INTERPRETASI HUKUM ATAS KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM ATAS TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG DALAM POJK 14/2019

Muhammad Rausyan Fikry (2310622066), Iwan Erar Joesoef, Diani Sadia Wati

Interpretasi ketentuan konversi utang menjadi saham (*debt to equity swap*) atas transaksi pembelian barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Prinsip keterbukaan dan kewajaran dalam transaksi antar pihak terafiliasi, termasuk dalam konteks konversi utang menjadi saham (*debt to equity swap*). Namun, ketentuan ini belum secara eksplisit mengatur konversi utang yang timbul dari transaksi pembelian barang, sehingga menimbulkan ruang interpretasi hukum terkait apakah utang usaha dari aktivitas operasional dapat dikonversi menjadi penyertaan modal melalui penerbitan saham baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan konversi utang menjadi saham sebagai strategi restrukturisasi keuangan, dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan pemegang saham publik berdasarkan POJK 14/2019. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode peraturan perundang-undangan dan studi kasus pada PT SLJ Global Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SLJ Global Tbk telah memenuhi prosedur formal POJK 14/2019, termasuk keterbukaan informasi, persetujuan RUPS, dan kriteria kreditur tidak terafiliasi. Namun, konversi utang usaha menimbulkan ambiguitas hukum karena ketidakjelasan apakah utang tersebut memenuhi definisi “pinjaman” dalam POJK 14/2019. Selain itu, dilusi saham publik sebesar 34,32% tanpa mekanisme perlindungan yang memadai menunjukkan kurangnya kepastian hukum. Penelitian merekomendasikan penafsiran normatif dan penguatan regulasi untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam praktik konversi utang.

Kata Kunci: Konversi, Utang, PMTHMETD, Investor, Hukum

ABSTRACT

**LEGAL INTERPRETATION OF DEBT-TO-EQUITY CONVERSION IN
GOODS PURCHASE TRANSACTIONS UNDER POJK 14/2019**

Muhammad Rausyan Fikry (2310622066), Iwan Erar Joesoef, Diani Sadia Wati

Interpretation of debt-to-equity swap provisions for goods purchase transactions as stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 14/POJK.04/2019 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest in Certain Transactions. The principle of openness and fairness in transactions between affiliated parties, including in the context of debt-to-equity swaps. However, this provision does not explicitly regulate the conversion of debt arising from goods purchase transactions, thus creating room for legal interpretation regarding whether business debt from operational activities can be converted into equity participation through the issuance of new shares. This study aims to analyze the implementation of debt-to-equity conversion as a financial restructuring strategy, with a focus on legal certainty and protection of public shareholders based on POJK 14/2019. The study uses a normative legal approach with the method of statutory regulations and case studies on PT SLJ Global Tbk. The results of the study indicate that PT SLJ Global Tbk has complied with the formal procedures of POJK 14/2019, including information disclosure, GMS approval, and unaffiliated creditor criteria. However, the conversion of business debt creates legal ambiguity due to the lack of clarity as to whether the debt meets the definition of “loan” in POJK 14/2019. In addition, the dilution of public shares by 34.32% without adequate protection mechanisms indicates a lack of legal certainty. The study recommends normative interpretation and strengthening of regulations to ensure fairness and legal certainty in the practice of debt conversion.

Keywords: Conversion, Debt, NPR, Investor, Legal